

PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

Rr. Niken Sitoresmi*) dan Siti Amanah

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologis Manusia, IPB

*)Email: nikensitoresmi90@gmail.com

ABSTRACT

Gender as a social construction and beliefs that thrive in the community produce gender inequalities experienced by women. This makes the weak position of women so prone to cases and acts of violence. Comprehensive facilitation for victims of violence are indispensable so that there should be an institution that takes care of this. Therefore, this study was done to find out, identify, describe and analyze the facilitation of women victims of violence by the integrated services centre empowerment of women and children (P2TP2A) DKI Jakarta. The research used survey using questionnaires, instruments was designed following concepts on gender ideology and the role of facilitation from P2TP2A DKI Jakarta. Quantitative and qualitative analysis were used to explain research results. Gender ideology attached to the respondents pointed out that the majority of the respondents have a positive gender ideology that leads to equity and equality of gender. The majority of respondents have knowledge about violence are high by agreeing to things that are associated with violence. There is no signification between the ideology gender of women victims with violence experienced. On the other hand, there is a signification between knowledge about violence of women victims with violence experienced. Respondents perceive that facilitation from P2TP2A DKI Jakarta is effective according to the needs of the victims. The activities conducted by P2TP2A help assisted process of recovery and motivate the women to have specific life skills, such as household economics.

Keywords: *violence, recovery, empowerment, women victims, P2TP2A.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Milenium sampai dengan tahun 2015, salah satu butirnya adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan, mengurangi adanya diskriminasi. kesenjangan dan tidak adanya diskriminasi. Kemajuan pembangunan kualitas hidup manusia Indonesia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik memaparkan angka IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 berturut-turut yaitu 70.10 70.59 71.17 71.76 72.27. Untuk angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) sendiri dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, yaitu 65,1 65,3, 66,38. Sedangkan angka *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2006

sampai tahun 2008, yaitu 61,3, 61,8, 62,27. Kesenjangan antara angka HDI dengan angka GDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia walaupun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun secara keseluruhan, namun belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender atau masih terdapat kesenjangan gender. Angka GEM Indonesia relatif rendah, hal ini menunjukkan partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.

Kebijakan pembangunan yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) telah membuat komitmen politik bahwa perempuan dan anak merupakan sasaran pembangunan di semua bidang dan program pembangunan. Semangat ini juga mendorong masyarakat terlibat dalam program-

program pembangunan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dari segala bentuk tindak ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Salah satunya adalah P2TP2A Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta yang meliputi: pelayanan informasi, psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis. Adanya P2TP2A di DKI Jakarta diharapkan dapat membuat terjalinnya hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di DKI Jakarta.

Masalah Penelitian

Wilayah DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang terdaftar pada tahun 2011 sebesar 9,73 juta jiwa dengan rasio jenis kelamin 103 dan laju pertumbuhan penduduk 1,27 persen per tahun (statistik daerah Provinsi DKI Jakarta 2011). Kondisi pertumbuhan kota Jakarta tersebut sudah semakin tinggi. Dampak tingginya pertumbuhan di Jakarta yaitu menimbulkan banyak permasalahan dari mulai masalah ekonomi, kemiskinan hingga masalah-masalah sosial di DKI Jakarta salah satunya yaitu ancaman kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu diperlukan penanganan yang komprehensif terhadap korban kekerasan di DKI Jakarta sehingga perlu ada lembaga yang berfokus menangani hal ini. Adanya P2TP2A di DKI Jakarta diharapkan dapat membuat terjalinnya hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di DKI Jakarta. Hal tersebut kemudian memunculkan keingintahuan penulis mengenai:

1. Apa sajakah jenis kekerasan yang dialami perempuan dampingan P2TP2A DKI Jakarta?
2. Bagaimana hubungan antara ideologi gender dan pengetahuan tentang kekerasan dengan kekerasan yang dialami perempuan dampingan P2TP2A DKI Jakarta?
3. Bagaimana strategi pendampingan P2TP2A DKI Jakarta dan kemampuan/daya pulih perempuan korban tindak kekerasan dampingan P2TP2A?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan jenis kekerasan yang dialami perempuan dampingan P2TP2A DKI Jakarta.
2. Menganalisis hubungan antara ideologi gender dan pengetahuan tentang kekerasan dengan kekerasan yang dialami perempuan dampingan P2TP2A DKI Jakarta.
3. Mendeskripsikan strategi pendampingan P2TP2A DKI Jakarta dan kemampuan/daya pulih perempuan korban tindak kekerasan dampingan P2TP2A.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Konsep, Ideologi dan Peran Gender

Istilah gender menurut Haralambos dan Holborn dalam Sunarto (2009) mempunyai konotasi psikologis, sosial, dan kultural antara pria dan wanita dalam menjalankan peran-peran maskulinitas dan feminitas tertentu di masyarakat. Seperti dikutip dalam Agusni S (2010) konsep gender dapat digunakan untuk melakukan analisis agar lebih dicermati pada aspek produktif, reproduktif, sosial, dan kontrol atau penguasaan.

Saptari (1997) mengemukakan mengenai konsep ideologi gender bahwa ideologi gender merupakan segala aturan, nilai, stereotipe yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin. Ideologi ini bisa terbentuk di berbagai tingkat, misalnya, tingkat negara, komunitas, atau keluarga dan disosialisasikan melalui berbagai pranata sosial yang dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat.

Peran menurut Hubeis (2010) adalah aspek dinamis dari status seseorang yang sudah terpolakan dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan. Peran gender berubah dari waktu ke waktu karena adanya perkembangan yang mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat. Dengan demikian, peran gender menampilkan kesepakatan pandangan dalam masyarakat dan budaya tertentu perihal ketepatan dan kelaziman bertindak untuk seks tertentu (jenis kelamin tertentu) dan masyarakat tertentu. Peran gender berbeda antar-masyarakat atau bahkan antar kelompok di dalam masyarakat tertentu. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua.

Menurut Hubeis (2010), secara universal peran gender untuk perempuan dan laki-laki diklasifikasikan dalam tiga peran pokok yaitu:

1. *Peran reproduktif (domestik)* adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya manusia dan tugas-tugas kerumahtanggaan seperti,
2. *Peran produktif (publik)* adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperdagangkan (petani, nelayan, pedagang, dll).
3. *Peran masyarakat (sosial)* adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik.

Isu Gender dalam Pembangunan

Menurut Hubeis 2010 analisis peran gender merupakan kajian sistematik tentang peranan, hubungan dan proses yang difokuskan pada ketidaksetaraan dalam akses dan kontrol terhadap kekuasaan, kekayaan, dan beban kerja antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat. Ketidaksetaraan tersebut dapat dilihat dari persentase perbandingan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia tahun 2009 menurut Badan Pusat Statistik (2010), yaitu: laki-laki 95,65 persen, sedangkan perempuan 89,68 persen. Kesenjangan gender juga terjadi di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada Februari 2011 menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai TPAK yang lebih besar daripada perempuan yaitu 72,26 dibandingkan 47,14 (BPS 2011).

Selanjutnya, persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Menurut data dan dokumentasi dari Komnas Perempuan jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang tercatat ditangani lembaga pengada layanan meningkat setiap tahun (tahun 2001-2008). Menurut Komnas Perempuan 2009, pada tahun 2008 peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213 persen mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP. Pada tahun 2009, peningkatan jumlah KTP mencapai 143.586 kasus atau naik 263 persen dari jumlah KTP tahun 2008 (Komnas perempuan 2010). Sedangkan untuk tahun 2010 menurut Komnas perempuan 2011, jumlah perempuan korban kekerasan sebanyak 105.103 orang. Kesenjangan gender sebagaimana diuraikan di atas, tentu merugikan perempuan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Perempuan dan Kekerasan

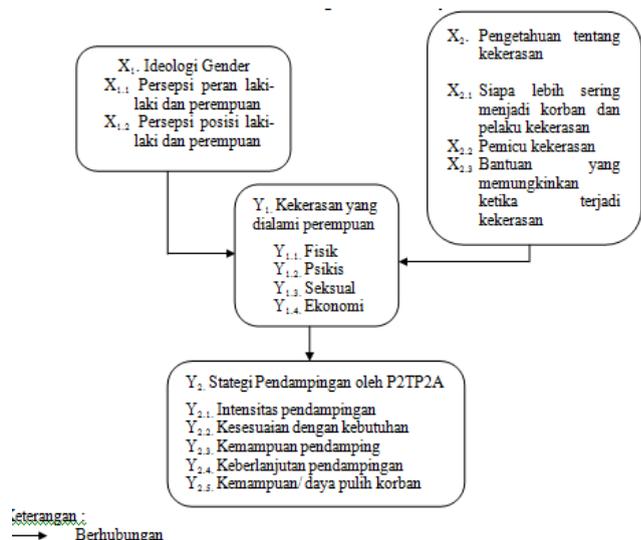
Isu gender dalam pembangunan yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya tidak lepas dari hasil konstruksi sosial-budaya di masyarakat yang memomorduakan perempuan. Budaya ini terkonstruksi secara terus-menerus dalam waktu yang lama sehingga melahirkan pola hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ketidakseimbangan ini melahirkan dampak negatif yang menyebabkan lemahnya posisi perempuan sehingga rentan terhadap kekerasan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Widanti (2005), bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pengertian kesehatan perempuan, beban kerja, akses terhadap pekerjaan dan pendapatan, serta kekerasan yang dialami perempuan sebenarnya bersumber dari pelabelan negatif terhadap perempuan.

Kekerasan menurut Kartika (2010) merupakan setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa

menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Menurut Sunarto (2009), kekerasan terhadap perempuan mempunyai dua bentuk yaitu, kekerasan di rumah dan kekerasan di lingkungan sosialnya. Kekerasan di rumah biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istrinya. Kekerasan di lingkungan sosial terjadi dalam bentuk perlakuan diskriminatif terhadap kaum wanita untuk menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Kekerasan senantiasa melibatkan dua pihak, pelaku (subyek), dan korban (obyek). Apabila subyek kekerasan itu dilakukan oleh seorang individu secara langsung disebut sebagai kekerasan personal, akan tetapi apabila pelakunya tidak tampak maka disebut sebagai kekerasan struktural. Pemukulan, penganiayaan, oleh satu orang terhadap orang lainnya merupakan tindak kekerasan personal. Sedangkan kekerasan struktural mewujudkan dalam bentuk eksploitasi, ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, ketidakseimbangan ekologis, ancaman dan ketakutan. Diantara berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan itu, faktor kekuasaan (*power*) merupakan sebab yang menonjol dalam mendorong terjadinya tindak kekerasan, baik secara personal ataupun struktural. Selama pandangan yang berorientasi kekuasaan ini hadir, selama itu pula kaum wanita akan selalu mengalami kekerasan gender.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode penelitian survei. Survei adalah penelitian dengan mengumpulkan informasi

dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya menggambarkan berbagai aspek dari populasi Koentjaraningrat (1994). Data primer yang berupa data kuantitatif diperoleh dari pengumpulan data melalui instrumen utama penelitian survei, yaitu kuesioner. Kuesioner tersebut yang diajukan kepada responden berisi isian untuk data pribadi termasuk kekerasan yang pernah dialami, 15 pernyataan ideologi gender, 25 pernyataan untuk pengetahuan tentang kekerasan, 10 pernyataan mengenai strategi pendampingan P2TP2A yang semuanya berskala *Likert* dan tabel untuk evaluasi kegiatan edukasi yang pernah dirasakan termasuk kemampuan pendamping. Kuesioner ini bermanfaat untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini didukung pula oleh pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mementingkan diperolehnya informasi atau data dari subyek penelitian secara alamiah, berdasarkan pengalaman sosial mereka masing-masing dan data yang didapatkan merupakan data deskriptif yang berupa kata-kata dari subyek penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan pada responden dan informan untuk melengkapi kebutuhan data primer penelitian. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara mendalam agar dapat menangkap pengalaman, persepsi, pemikiran, perasaan, dan pengetahuan dari subyek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui literatur, catatan, data dan dokumentasi dari P2TP2A.

PEMBAHASAN

Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

1. Sejarah berdirinya P2TP2A DKI Jakarta

Pada tahun 2002 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendorong pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang masih dirasakan kurang mendapat perhatian dan sampai saat ini pembentukan P2TP2A sudah terdapat di 17 provinsi dan 113 Kabupaten/kota.

Pada tahun 2002 yang sama, bidang pemberdayaan perempuan Provinsi DKI Jakarta membuat kajian kerentanan perempuan dan anak korban kekerasan dan menemukan temuan bahwa perempuan dan anak di DKI Jakarta rentan terhadap kekerasan. Pada tahun 2003-2004 dilakukan kajian dan studi banding perlunya P2TP2A dan hasil studi menyatakan bahwa perlu dibentuknya P2TP2A di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pembentukan P2TP2A tanggal 22 Juni 2004 saat peringatan HUT DKI ke-478.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya Km. 18 Pulo Gadung, Jakarta Timur, Telp 021- 47882898, Fax 021-47882899 adalah pusat pelayanan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta.

Layanan yang diberikan di P2TP2A DKI Jakarta, meliputi: pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis.

2. Gambaran Statistik Populasi Dampungan P2TP2A DKI Jakarta

P2TP2A DKI Jakarta bersama mitra kerja terkait pada tahun 2006 hingga 2010 telah menangani sekitar 5931 klien kasus kekerasan. Untuk tahun 2006 sendiri sekitar 1015 klien, tahun 2007 sebanyak 1583 klien, tahun 2008 sebanyak 1448 klien, tahun 2009 sebanyak 950 klien serta untuk tahun 2010 sebanyak 935 klien.

Klien P2TP2A Provinsi DKI Jakarta terdiri dari perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Selama tahun 2006-2010 klien perempuan P2TP2A sebanyak 72 persen, sedangkan untuk klien anak sebanyak 28 persen dari keseluruhan klien yang telah ditangani oleh P2TP2A. Ada berbagai jenis kasus kekerasan yang telah ditangani oleh P2TP2A, diantaranya kasus KDRT yang terbesar yakni sekitar 68 persen, kasus kekerasan seksual 18 persen, kasus perdagangan perempuan sebanyak 1 persen dan jenis kekerasan diluar dari ketiga kasus sebelumnya sebesar 13 persen dari keseluruhan jumlah jenis kasus kekerasan yang telah ditangani oleh P2TP2A.

Dari beberapa jenis kasus kekerasan yang telah ditangani oleh P2TP2A dapat diketahui bahwa jenis kekerasan yang terbesar adalah KDRT, yaitu sebesar 68 persen. KDRT sendiri ada berbagai macam bentuknya, diantara adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. P2TP2A dari tahun 2006-2010 telah menangani bentuk KDRT untuk kekerasan fisik sebesar 66 persen, kekerasan psikis 18 persen, kekerasan seksual 6 persen, serta bentuk kekerasan penelantaran sebesar 10 persen

Data statistik dari P2TP2A DKI Jakarta tahun 2010 dapat diketahui besarnya persentase kasus kekerasan yang terjadi di lima bagian wilayah di DKI Jakarta. Kasus kekerasan tertinggi terjadi di wilayah Jakarta Timur dengan persentase 32 persen, kemudian diikuti oleh wilayah Jakarta bagian Barat dengan persentase kasus kekerasan sebesar 16 persen. Faktor yang dapat mempengaruhi tingginya persentase kasus kekerasan di Jakarta Timur salah satunya adalah keberadaan terminal bus (Pulo Gadung) yang merupakan tempat umum dan rawan terhadap tindak kekerasan. Selain itu juga karena keberadaan P2TP2A itu sendiri yang terletak di wilayah Jakarta Timur sehingga mampu memaksimalkan fungsinya untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah tersebut. Persentase kasus kekerasan terbesar ketiga dimiliki oleh wilayah Jakarta Utara serta kasus pada Polda Metro Jaya dengan besar persentase yang sama yaitu 15 persen. Terakhir kasus kekerasan yang dapat dikategorikan terendah dengan persentase 11 persen adalah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Karakteristik Responden (Perempuan Dampungan P2tp2a Provinsi Dki Jakarta)

Karakteristik Individu Responden

P2TP2A DKI Jakarta dari data pada tahun 2011 telah mendampingi 1381 korban kekerasan dengan persentase klien anak sebesar 30 persen dan klien perempuan sebesar 70 persen. Dari sejumlah angka tersebut dipilih sebanyak 30 orang responden penelitian yang sesuai kriteria. Dari sejumlah aspek yang ditanyakan, perlu diketahui karakteristik individu perempuan korban kekerasan dampungan P2TP2A. Karakteristik yang akan diuraikan meliputi, usia, pendidikan terakhir, dan status pernikahan responden yang disajikan pada Tabel 1. Dengan mengetahui karakteristik individu, dapat mempermudah lembaga menerapkan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka memulihkan kondisi psikologis korban kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa persentase terbesar usia responden terdapat pada usia madya yang berada pada selang antara 30-55 tahun, yakni sebesar 73 persen, sedangkan untuk kategori usia muda dan usia tua masing-masing sebesar 17 persen dan 10 persen dari keseluruhan responden.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Karakteristik Individu

Karakteristik Responden	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Usia (tahun)	Usia Muda (<30 tahun)	5	17
	Usia Madya (30-55 tahun)	22	73
	Usia Tua (>55 tahun)	3	10
	Jumlah (N)	30	100
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah (< 6 tahun)	3	10
	Lulus SD-SMP (6-9 tahun)	13	43
	Lulus SMA (> 9 tahun)	14	47
	Jumlah (N)	30	100
Status Pernikahan	Belum Menikah	1	3
	Menikah	8	27
	Cerai	20	67
	Menunggu Putusan Pengadilan	1	3
Jumlah (N)	30	100	

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden lulus SMA dengan jumlah persentase sebesar 47 persen. Sedangkan responden yang berpendidikan rendah karena tidak mencapai 6 tahun pendidikan formal atau hanya setingkat lulus SMP masing-masing mendapatkan persentase sebesar 10 persen dan 43 persen dari keseluruhan persentase jumlah responden. Tingginya angka pendidikan responden dapat dipengaruhi oleh keberadaan responden yang pada umumnya berasal dan tinggal di wilayah DKI Jakarta.

DKI Jakarta merupakan Ibukota negara yang memberikan kemudahan lebih untuk akses pendidikan dan dengan lingkungan sosial-budaya yang lebih mengerti akan pentingnya pendidikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas atau sebesar 67 persen responden telah bercerai. Hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat pendidikan dan ideologi gender (Tabel 3) kuat yang melekat pada mayoritas responden sehingga membuat mereka sadar akan hak-hak sebagai perempuan dan seorang istri. Oleh karena itu, mayoritas responden berani untuk menuntut hak-hak mereka terhadap kekerasan (mayoritas KDRT) yang mereka alami. Pada akhirnya tuntutan tersebut berakhir pada putusan untuk mengakhiri sebuah pernikahan (bercerai). Sebesar 27 persen responden masih berstatus menikah, sisanya sebesar 3 persen responden berstatus belum menikah dan masih menggantung (sedang menunggu putusan pengadilan).

Karakteristik Pelaku Kekerasan

Menurut Sunarto 2009 kekerasan senantiasa melibatkan dua pihak, pelaku (subyek), dan korban (obyek). Pada bagian ini akan mendeskripsikan secara singkat mengenai karakteristik pelaku (subyek) kekerasan. Dalam penelitian ini, karakteristik pelaku kekerasan tidak dapat dideskripsikan secara mendalam, hanya sebatas pada usia pelaku dan hubungannya dengan responden. Hal tersebut disebabkan pertanyaan menyangkut pelaku kekerasan akan sangat sensitif dan dirahasiakan identitasnya oleh responden karena akan mengingatkan mereka tentang pengalaman pahit yang pernah mereka alami.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Pelaku Kekerasan Berdasarkan Karakteristik Individu dan Hubungannya dengan Responden

Karakteristik Pelaku	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Usia (tahun)	Usia Muda (<30 tahun)	4	13
	Usia Madya (30-55 tahun)	20	67
	Usia Tua (>55 tahun)	6	20
	Jumlah (N)	30	100
Hubungan Pelaku dengan Responden	Orang Tua	0	0
	Suami	26	87
	Orang lain (pacar, atasan kerja, dll)	4	13
	Jumlah (N)	30	100

Tabel 2 di atas, dapat dideskripsikan bahwa pelaku kekerasan mayoritas atau sebesar 67 persen berusia 30-55 tahun. Sedangkan sisanya sebanyak 13 persen dan 20 persen berusia kurang dari 30 tahun dan lebih dari 55 tahun. Jelas terlihat kesamaan mayoritas usia antara responden dan pelaku. Jika dilihat lebih lanjut pada Tabel 2 pelaku kekerasan ternyata merupakan orang terdekat responden. Terlihat bahwa sebesar 87 persen pelaku kekerasan adalah suami responden sendiri.

Ideologi Gender yang Melekat pada Responden

Hasil penelitian pada bagian ini, menunjukkan adanya ideologi sadar gender yang dipengaruhi faktor limitasi penelitian yang tidak dapat melihat ideologi gender dari sisi pelaku dan lingkungan sekitar responden. Dari Tabel 3 diatas dapat dideskripsikan bahwa mayoritas pernyataan yang diberikan tidak disepakati oleh mayoritas responden karena dianggap terlalu memihak pada salah satu jenis kelamin. Hanya beberapa pernyataan tertentu saja yang disetujui oleh mayoritas responden, diantaranya mengenai perempuan adalah pekerja rumahan dan laki-laki pencari nafkah disetujui oleh sebesar 73 persen, kemudian sebanyak 60 persen responden menyetujui bahwa pekerjaan perempuan ialah di dalam rumah mengurus keluarga dan anak, pekerjaan laki-laki di luar rumah mencari nafkah.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Pandangan Responden Mengenai Peran dan Posisi Laki-laki dan Perempuan

Pernyataan	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Perempuan tidak boleh melakukan kegiatan kemasyarakatan, laki-laki boleh melakukan kegiatan kemasyarakatan	Setuju	4	13
Perempuan memiliki kemampuan bekerja yang kurang baik, laki-laki memiliki kemampuan bekerja yang baik	Setuju	6	20
Perempuan hanya mampu melakukan pekerjaan yang mudah, laki-laki mampu mengerjakan pekerjaan yang sulit	Setuju	7	23
Laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan domestik, perempuan harus mengerjakan pekerjaan domestik	Setuju	7	23
Perempuan boleh bekerja di luar rumah namun dengan izin suami, laki-laki boleh bekerja di luar rumah tanpa harus dengan izin istri	Setuju	9	30
Anak laki-laki superior harus didahulukan, anak perempuan inferior dinomorduakan	Setuju	9	30
Posisi tertinggi dalam pekerjaan sebaiknya dipegang oleh laki-laki dan posisi perempuan di bawah laki-laki	Setuju	10	33
Perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah, laki-laki boleh bekerja di luar rumah	Setuju	11	37
Perempuan tidak kuat dalam menghadapi persaingan dunia kerja, laki-laki kuat dalam menghadapi persaingan dunia kerja	Setuju	11	37
Laki-laki mampu bekerja mandiri, perempuan tergantung kepada suami	Setuju	13	43
Pekerjaan perempuan ialah di dalam rumah mengurus keluarga dan anak, pekerjaan laki-laki di luar rumah mencari nafkah	Setuju	18	60

Perempuan mengabdikan kepada suami, laki-laki diabdikan oleh istri	Setuju	20	67
Perempuan adalah pekerja rumahan dan laki-laki pencari nafkah	Setuju	22	73
Perempuan melayani suami, suami dilayani oleh istri	Setuju	24	80

Terdapat 67 persen responden juga sepakat untuk pernyataan mengenai perempuan mengabdikan kepada suami, laki-laki diabdikan oleh istri, begitu pula mengenai pandangan bahwa perempuan melayani suami, suami dilayani oleh istri disetujui oleh 80 persen responden.

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Ideologi Gender yang Melekat pada Responden

Kategorisasi Peubah	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Ideologi Gender	Positif	20	67
	Negatif	10	33
	Jumlah (N)	30	100

Secara lebih spesifik, ideologi gender yang melekat pada responden dengan memperhitungkan pandangan-pandangan responden sebelumnya mengenai peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebesar 33 persen responden yang memiliki ideologi gender negatif atau pandangan yang mencerminkan struktur patriarkal, yaitu keberpihakan pada laki-laki bahwa peran kerja dan posisi perempuan berbeda dengan laki-laki yang menciptakan ketimpangan diantara keduanya.

Sedangkan mayoritas atau sebesar 67 persen responden memiliki ideologi gender positif yang menunjukkan adanya pemikiran relatif tidak ada perbedaan peran kerja serta posisi antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut mengartikan bahwa responden tidak menganut pandangan bahwa peran laki-laki dalam sektor publik dan perempuan dalam sektor domestik.

Pengetahuan Responden tentang Kekerasan

Hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan tinggi terhadap kekerasan mengartikan bahwa mayoritas responden menyetujui hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang rendah hanya terjadi di beberapa hal saja. Pernyataan tersebut tidak disetujui oleh mayoritas responden, diantaranya mengenai setiap orang yang memungkinkan mendapatkan kekerasan, perempuan/istri harus selalu merahasiakan kekerasan yang dialami olehnya, kekerasan merupakan masalah internal serta orang lain tidak perlu ikut mencampuri, dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami merupakan hal yang wajar untuk mengoreksi istri yang salah. Pernyataan tersebut masing-masing tidak disetujui oleh

sebesar 57 persen, 70 persen, 73 persen, dan 80 persen responden.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Pengetahuan Responden Mengenai Hal-hal Terkait dengan Kekerasan

Pernyataan	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Kekerasan dapat menimbulkan trauma pada korbannya	Setuju	30	100
Bantuan/dukungan dapat berasal dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial (seperti lembaga bantuan hukum)	Setuju	29	97
Bantuan/dukungan dapat berasal dari tenaga kesehatan	Setuju	28	93
Stres dapat menjadi pemicu kekerasan	Setuju	27	90
Bantuan/dukungan dapat berasal dari orang tua, saudara, tetangga, dan tokoh setempat	Setuju	27	90
Kekerasan lebih sering dilakukan oleh laki-laki	Setuju	24	80
Penggunaan alkohol dapat memicu terjadinya kekerasan	Setuju	24	80
Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan	Setuju	23	77
Pengangguran dapat lebih memicu resiko kekerasan	Setuju	23	77
Dukungan dan bantuan dari orang lain dapat mengurangi rasa putus asa korban kekerasan	Setuju	23	77
Keluarga yang kurang harmonis menjadi pemicu kekerasan dalam rumahtangga	Setuju	22	73
Melukai secara fisik (memukul) merupakan contoh bentuk kekerasan	Setuju	20	67
Sengaja membiarkan anggota keluarga terlantar tanpa diberikan nafkah adalah bentuk kekerasan dalam rumahtangga	Setuju	20	67
Memaksa seorang istri untuk melayani kebutuhan seksual suami ketika istri sedang tidak siap secara fisik dan psikologis merupakan bentuk kekerasan dalam dalam rumahtangga	Setuju	19	63
Nikah dini lebih beresiko mengalami kekerasan dalam rumahtangga	Setuju	19	63
Pendapatan rumahtangga rendah dapat lebih memicu resiko kekerasan dalam rumahtangga	Setuju	18	60
Perkataan yang menimbulkan ketakutan, tidak berdaya seperti menghina, kata-kata kasar merupakan contoh bentuk kekerasan	Setuju	18	60
Remaja perempuan lebih beresiko mengalami kekerasan	Setuju	17	57
Keluarga dengan jumlah anak banyak beresiko terjadi kekerasan dalam rumahtangga	Setuju	16	53
Pendidikan rendah dapat lebih memicu resiko kekerasan	Setuju	16	53
Membatasi ruang gerak (isolasi) atau melarang istri untuk bersosialisasi dengan orang lain adalah bentuk kekerasan dalam rumahtangga	Setuju	16	53
Setiap orang memungkinkan mendapatkan kekerasan	Setuju	13	43
Perempuan/Istri harus selalu merahasiakan kekerasan yang dialami olehnya	Setuju	9	30
Kekerasan merupakan masalah internal dan orang lain tidak perlu ikut mencampuri	Setuju	8	27
Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami merupakan hal yang wajar untuk mengoreksi istri yang salah	Setuju	6	20

Dapat digambarkan lebih spesifik pada Tabel 6 bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan tentang kekerasan yang tinggi dengan persentase sebesar 90 persen. Hanya sebesar 10 persen saja dari keseluruhan jumlah persentase responden yang tidak menyetujui hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Hal ini mampu menguatkan Tabel 5 bahwa mayoritas responden menyetujui hal-hal yang terkait dengan kekerasan.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Pengetahuan Responden terhadap Kekerasan

Kategorisasi Peubah	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Pengetahuan tentang kekerasan	Rendah	3	10
	Tinggi	24	90
Jumlah (N)		30	100

Kekerasan yang Dialami Responden

Merujuk pada Poerwandari (2000) mengenai gambaran umum kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan finansial/ekonomi, pada Tabel 7 disajikan jumlah dan persentase kekerasan yang dialami responden. Kekerasan yang dibahas pada penelitian ini tidak mengukur sampai sejauh mana tingkat kekerasan tersebut bagi responden. Hal tersebut dikarenakan sangat sensitif dan responden memiliki hak untuk dilindungi sesuai UU pasal 13 tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam hal ini responden memiliki hak untuk merahasiakan identitas serta pengalaman pahit yang pernah mereka rasakan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas jenis kekerasannya tanpa mendeskripsikan lebih lanjut sejauh mana tingkat kekerasan tersebut dialami dan dirasakan oleh responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50 persen responden mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Sebanyak 20 persen responden lainnya mengalami kekerasan fisik, diikuti dengan kekerasan ekonomi sebanyak 10 persen. Sisanya untuk kekerasan psikis dan seksual dirasakan oleh masing-masing sebanyak 17 persen dan 3 persen responden.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Jenis Kekerasan yang Dialami Responden

Kekerasan yang dialami	Jumlah	
	n	%
Fisik (kekerasan dengan benda/alat di bagian atas tubuh)	6	20
Psikis	5	17
Seksual	1	3
Ekonomi	3	10
Lebih dari satu kekerasan (Fisik-psikis, psikis-ekonomi, psikis-seksual, fisik, psikis, ekonomi)	15	50
Jumlah (N)	30	100

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Hubungan Usia dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Usia Korban	Kekerasan yang dialami										Total	
	fisik		psikis		seksual		Ekonomi		> 1 kekerasan			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
muda (<30)	2	33,3	0	0	1	100	0	0	2	13,3	5	16,7
madya (30-55)	4	66,7	4	80	0	0	2	66,7	12	80	22	73,3
tua (>55)	0	0	1	20	0	0	1	33,3	1	6,7	3	10
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	15	100	30	100

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Hubungan Pendidikan Terakhir dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Pendidikan Terakhir	Kekerasan yang dialami										Total	
	fisik		psikis		seksual		Ekonomi		> 1 kekerasan			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
< 6 tahun	0	0	0	0	0	0	1	33,3	2	13,3	3	10
6-9 tahun	5	83,3	2	40	1	100	1	33,3	4	26,7	13	43,3
> 9 tahun	1	16,7	3	60	0	0	1	33,3	9	60	14	46,7
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	15	100	30	100

Responden dengan Kekerasan yang Dialami Responden Kekerasan yang dialami jika dihubungkan dengan karakteristik responden mengenai usia, pendidikan terakhir, dan status pernikahan responden masing-masing dapat dilihat pada Tabel 8, 9, dan 10.

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Hubungan Status Pernikahan dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Status Pernikahan	Kekerasan yang dialami										Total	
	fisik		psikis		Seksual		Ekonomi		> 1 kekerasan			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Blm menikah	1	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,3
Menikah	1	16,7	1	20	0	0	0	0	6	40	8	26,7
Cerai	3	50	4	80	1	100	3	100	9	60	20	66,7
Menunggu putusan pengadilan	1	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,3
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	15	100	30	100

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Hubungan Pelaku dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Hub. Pelaku dengan Responden	Kekerasan yang dialami										Total	
	fisik		psikis		seksual		Ekonomi		> 1 kekerasan			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Suami	5	83,3	4	80	0	0	3	100	14	93,3	26	86,7
Lainnya (pacar, atasan kerja)	1	16,7	1	20	1	100	0	0	1	6,7	4	13,3
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	15	100	30	100

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Hubungan Usia Pelaku dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Usia Pelaku	Kekerasan yang dialami Responden										Total	
	fisik		Psikis		seksual		Ekonomi		> 1 kekerasan			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
muda (<30)	2	33,3	0	0	1	100	0	0	1	6,7	4	13,3
madya (30-55)	3	50	4	80	0	0	2	66,7	11	73,3	20	66,7
tua (>55)	1	16,7	1	20	0	0	1	33,3	3	20	6	20
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	15	100	30	100

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL TERKAIT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Hubungan Ideologi Gender yang Melekat pada Responden dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Dari Tabel 13 berikut, dapat digambarkan bahwa mayoritas responden mendapatkan lebih dari satu jenis kekerasan dan memiliki ideologi gender positif (sebesar 66,7 persen). Namun, secara merata kekerasan juga dialami oleh responden dengan kedua ideologi tersebut, baik positif maupun negatif. Berdasarkan hasil analisis uji statistik *Chi-square* antara ideologi gender yang melekat pada responden dengan kekerasan yang dialami responden, tingkat signifikansi yang dihasilkan $0.8 > 0.05$ level of significant (α). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak signifikan. Artinya tidak terdapat hubungan antara ideologi gender yang melekat pada responden dengan kekerasan yang dialami responden. Responden pada umumnya tidak menyetujui adanya persepsi yang membedakan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat, namun kenyataannya mereka tetap menjadi korban tindak kekerasan.

Hasil penelitian pada bagian ini tidak sejalan dengan rujukan teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya ideologi gender yang berhubungan dengan kekerasan yang dialami responden tidak dapat dilihat hanya dari sisi responden saja. Namun, juga perlu dilihat dari sisi pelaku kekerasan dan lingkungan masyarakatnya. Hal inilah yang menjadi limitasi penelitian pada bagian ini. Selain itu, walaupun kekerasan yang dialami oleh responden bukanlah suatu hal yang disetujui ataupun diinginkan oleh

semua orang khususnya perempuan, namun penolakan terhadap tindak kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Perempuan yang sudah sadar gender dan berpendidikan tinggi sekalipun, seperti mayoritas responden pada penelitian ini, tetap saja berpotensi untuk mengalami tindak kekerasan. Apalagi jika keadaan yang ada adalah sebaliknya. Pada akhirnya kekerasan terhadap perempuan tetap saja marak terjadi.

Tabel 13. Jumlah dan Persentase Hubungan Ideologi Gender yang Melekat pada Responden dengan Kekerasan yang dialami Responden

Ideologi Gender	Kekerasan yang dialami											
	Fisik		Psikis		Seksual		Ekonomi		Lebih dari 1 kekerasan		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Positif	3	50	4	80	1	10	2	66,7	1	66,7	2	66,7
Negatif	3	50	1	20	0	0	1	33,3	5	33,3	1	33,3
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	1	100	3	100

❖ signifikansi/ $\alpha = 0,8$

Hubungan Pengetahuan tentang kekerasan yang Melekat pada Responden dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai ada tidaknya hubungan antara pengetahuan responden terhadap kekerasan dengan kekerasan yang dialami responden. Pengetahuan responden mengenai siapa yang lebih sering menjadi korban dan pelaku kekerasan, pemicu kekerasan, serta bantuan yang memungkinkan ketika terjadi kekerasan seperti tergambar pada Tabel 14 dengan kekerasan yang dialami oleh responden. Dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden yang mengalami lebih dari satu jenis kekerasan dan memiliki pengetahuan tentang kekerasan kuat dengan persentase terbesar yaitu 86,7 persen. Begitu pula dengan responden yang mengalami 83,3 persen kekerasan fisik, 80 persen seksual, dan 66,7 persen penelantaran ekonomi.

Artinya adanya pengetahuan responden yang kuat mengenai perempuan sebagai korban, laki-laki sebagai pelaku kekerasan, pemicu kekerasan, serta bantuan yang memungkinkan ketika terjadi kekerasan yang disetujui oleh mayoritas responden berhubungan dengan kekerasan yang dialami oleh responden. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan hasil analisis uji statistik *Chi-square* antara pengetahuan tentang kekerasan yang melekat pada responden dengan kekerasan yang dialami responden. Tingkat signifikansi yang dihasilkan $0,03 < 0,05$ level of significant (α). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel signifikan. Artinya terdapat hubungan antara pengetahuan tentang kekerasan yang melekat pada responden dengan kekerasan yang dialami responden.

Tabel 14. Jumlah dan persentase Hubungan antara Pengetahuan tentang kekerasan yang Melekat pada Responden dengan Kekerasan yang Dialami Responden

Pengetahuan tentang kekerasan an	Kekerasan yang dialami											
	Fisik		Psikis		Seksual		Ekonomi		Lebih dari 1 kekerasan an		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
Lemah	0	16,7	0	20	1	10	0	33,3	2	33,3	3	10
Kuat	6	83,3	5	80	0	0	3	66,7	1	86,7	2	90
Total	6	100	5	100	1	100	3	100	1	100	3	100

❖ signifikansi/ $\alpha = 0,03$

STRATEGI PENDAMPINGAN OLEH P2TP2A DKI JAKARTA

Pendampingan yang Diberikan oleh P2TP2A DKI Jakarta

Pada bagian ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai sejauh mana pendampingan ataupun pelayanan P2TP2A yang dirasakan oleh responden. Dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan P2TP2A DKI Jakarta telah memberikan pelayanan hukum berupa proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan, memberikan perlindungan dan konsultasi hukum bagi responden, menjadi pendamping (kuasa hukum) dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu juga, memberikan pelayanan psikologis berupa mempertemukan dengan kelompok dukungan (sesama korban) serta memberikan pelayanan yang bersifat mendidik berupa kegiatan-kegiatan pelatihan.

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Keseluruhan Pendampingan P2TP2A DKI Jakarta

Kategorisasi Peubah	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Pendampingan P2TP2A yang Diterima Responden	Rendah	0	0
	Tinggi	30	100
Jumlah (N)		30	100

Pada Tabel 16 ini menggambarkan bahwa keseluruhan bentuk pendampingan diterima dan dirasakan tinggi oleh 100 persen responden. Hal ini membuktikan bahwa secara umum P2TP2A DKI Jakarta telah melakukan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan sesuai dengan fungsi peran, tugas, dan tanggungjawabnya.

Tabel 15. Jumlah dan Persentase Bentuk Pendampingan P2TP2A DKI Jakarta yang Dirasakan Oleh Responden

Bentuk Pendampingan P2TP2A	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Memberikan pelayanan hukum berupa proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan	Ya	30	100
Memberikan perlindungan dan konsultasi hukum bagi perempuan korban tindak kekerasan	Ya	30	100
Memberikan pendampingan dengan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan	Ya	30	100
Memberikan pelayanan psikologis berupa mempertemukan dengan kelompok dukungan (sesama korban)	Ya	30	100
Memberikan pelayanan yang bersifat mendidik berupa kegiatan-kegiatan seperti, pelatihan, seminar, dan penelitian	Ya	30	100
Memberikan pelayanan psikologis berupa pendampingan dan konseling	Ya	28	93
Memberikan perlindungan sementara berupa rumah aman yang keberadaannya dirahasiakan	Ya	24	80
Memberikan pelayanan kesehatan berupa penanganan luka atau penyakit akibat kekerasan	Ya	22	73
Memberikan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit ataupun Puskesmas mitra kerja P2TP2A	Ya	21	70
Memberikan pelayanan kesehatan pembuatan visum (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti di pengadilan	Ya	21	70

Bentuk Edukasi P2TP2A Kepada Responden

Salah satu faktor strategi pendampingan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan pendampingan yang tinggi oleh P2TP2A DKI Jakarta adalah adanya bentuk pendampingan berupa pemberian edukasi. Pemberian edukasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya berupa pelatihan bagi klien lama yang proses perlingkungannya hampir atau telah selesai. Salah satu pelatihan yang dilakukan oleh P2TP2A yang bekerja sama dengan Dinas Sosial adalah pelatihan tata boga yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini. Pelatihan dilakukan di Yayasan Taruna Eka Bakti dua kali dalam satu tahun dengan intensitas satu minggu setiap kali pelatihan. Pelatih dalam pelatihan ini didatangkan langsung oleh pihak yayasan.

Responden merasakan adanya manfaat psikologis dari pelatihan ini dengan adanya pertemuan antar sesama korban, selain itu juga mereka merasa keterampilan mereka bertambah khususnya dalam hal tata boga. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu responden (CH/32 tahun) berikut:

“...yaaa, senang aja gitu, ternyata selama ini saya gag sendiri, ada temen-temen juga yang pernah punya pengalaman gag enak kayak saya. Saya juga jadi bisa belajar buat kue-kue. Nambah keterampilan juga kan ya...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh P2TP2A selain bermanfaat untuk membantu memulihkan kondisi psikologis juga dapat menambah keterampilan tata boga bagi responden. Keberlanjutan dari pelatihan ini juga cukup bagus, P2TP2A bekerja sama dengan Dinas Sosial memberikan modal per orang sejumlah dua juta rupiah yang berupa uang dan peralatan masak termasuk kompor dan tabung gas.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pelatihan tata boga ini juga dipengaruhi karena adanya kemampuan pelatih yang mampu menarik minat peserta. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki pelatih menurut responden dapat digambarkan pada Tabel 17. Menurut hasil penelitian yang telah digambarkan pada Tabel 17 dapat dikatakan kemampuan pelatih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu dari segi materi yang dimengerti oleh 100 persen responden dengan mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir. Untuk mempraktekkan ilmu yang telah diberikan pada saat pelatihan hanya dilakukan oleh 73 persen responden saja.

Tabel 17. Jumlah dan Persentase Kemampuan Pelatih Menurut Responden

Kemampuan Pelatih	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	Persen
Materi dimengerti oleh peserta	Rendah	0	0
	Sedang	0	0
	Tinggi	30	100
Jumlah (N)		30	100
Peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir	Rendah	0	0
	Sedang	0	0
	Tinggi	30	100
Jumlah (N)		30	100
Peserta mampu mempraktekkan teori dalam kehidupan sehari-hari	Rendah	0	0
	Sedang	8	27
	Tinggi	22	73
Jumlah (N)		30	100

Kemampuan/Daya Pulih Responden

Strategi dan bentuk-bentuk pendampingan oleh P2TP2A DKI Jakarta yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi salah satu faktor penentu yang penting bagi pulihnya keadaan perempuan korban tindak kekerasan. Keberadaan P2TP2A sendiri sangat dibutuhkan oleh responden baik untuk membantu proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan juga bagi pulihnya keadaan psikologis responden.

Untuk mengetahui lebih lanjut kemampuan/daya pulih responden dapat dilihat pada Tabel 18 mengenai jumlah dan persentase bentuk-bentuk kemampuan/daya pulih responden. Kategori rendah merupakan kemampuan yang sangat kurang, sedang untuk kemampuan kurang, dan tinggi untuk kemampuan cukup/bagus. Sejauh ini hasil penelitian menunjukkan sebanyak 7 persen responden merasa kurang dan 93 persen responden

merasa cukup bagus untuk dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Selanjutnya kemampuan untuk sosialisasi dengan keluarga/kerabat dianggap kurang oleh 17 persen responden sedangkan kemampuan cukup/bagus diakui oleh sebesar 83 persen responden. Untuk kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar diakui kurang oleh 23 persen responden, sedangkan untuk yang cukup/bagus diakui oleh 77 persen responden. Selanjutnya secara berturut-turut kemampuan yang sangat kurang, kurang, dan cukup/bagus untuk menceritakan pengalaman pahit yang pernah dirasakan kepada orang lain untuk dijadikan pelajaran diakui oleh masing-masing sebesar 17 persen, 6 persen, dan 77 persen responden.

Tabel 18. Jumlah dan Persentase Bentuk-Bentuk Kemampuan/Daya Pulih Responden

Kemampuan Responden	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Dapat beraktivitas kembali seperti biasa	Rendah	0	0
	Sedang	2	7
	Tinggi	28	93
	Jumlah (N)	30	100
Bersedia bersosialisasi dengan keluarga/kerabat	Rendah	0	0
	Sedang	5	17
	Tinggi	25	83
	Jumlah (N)	30	100
Bersedia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar	Rendah	0	0
	Sedang	7	23
	Tinggi	23	77
	Jumlah (N)	30	100
Bersedia menceritakan pengalaman pahit yang pernah dirasakan kepada orang lain untuk dijadikan pelajaran	Rendah	5	17
	Sedang	2	6
	Tinggi	23	77
	Jumlah (N)	30	100

Dari keseluruhan bentuk kemampuan yang telah dilakukan oleh responden pasca pengalaman pahit yang pernah mereka rasakan dapat disimpulkan bahwa daya pulih responden cukup bagus. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 19 yang menunjukkan bahwa sebanyak 20 persen responden memiliki daya pulih yang kurang, sedangkan untuk 80 persen responden lainnya memiliki daya pulih yang cukup/bagus.

Tabel 19. Jumlah dan Persentase Kemampuan/Daya Pulih Responden

Kategorisasi Peubah	Kategorisasi Sub-peubah	Jumlah	
		n	%
Kemampuan/Daya Pulih	Rendah	0	0
	Sedang	6	20
	Tinggi	24	80
	Jumlah (N)	30	100

PENUTUP

Kesimpulan

P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta diinformasikan telah menangani sekitar 5931 klien kasus kekerasan dengan klien terbesar perempuan yaitu sebanyak 72%. Dari hasil penelitian diketahui bahwa:

1. Persentase terbesar usia perempuan dampingan P2TP2A yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada usia madya yaitu pada selang antara 30-55 tahun. Mayoritas pendidikan terakhir responden mencapai lulus SMA. Responden sebagian besar diketahui pula telah berstatus cerai. Setara dengan responden, pelaku kekerasan mayoritas berusia 30-55 tahun. Pelaku kekerasan merupakan orang terdekat responden yang tidak lain adalah suami responden sendiri yang menunjukkan KDRT masih mendominasi.
2. Mayoritas responden memiliki ideologi gender positif, yakni pandangan terhadap peran gender yang tidak bersifat diskriminatif, subordinatif dan memarginalkan perempuan/laki-laki. Pandangan yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender.
3. Pengetahuan responden terhadap kekerasan dapat dikategorikan tinggi. Keadaan tersebut mengartikan bahwa responden menyetujui hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Hal tersebut meliputi pernyataan mengenai siapa yang lebih sering menjadi korban dan pelaku, pemicu kekerasan, serta bantuan yang memungkinkan ketika terjadi kekerasan menurut responden.
4. Mayoritas responden mengalami KDRT yang menerima lebih dari satu jenis kekerasan.
5. Pengetahuan mengenai hal-hal yang terkait dengan kekerasan ternyata berhubungan dengan kekerasan yang dialami oleh responden. Namun antara ideologi gender yang dimiliki oleh responden dengan kekerasan yang dialami oleh responden ternyata tidak berhubungan.
6. P2TP2A DKI Jakarta telah melakukan fungsi tugas pendampingan berupa pelayanan hukum, kesehatan, psikologis, rumah aman hingga pemberdayaan berupa pelatihan-pelatihan. Hal tersebut menguatkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta dapat dikatakan memiliki intensitas, keberlanjutan, serta kesesuaian dengan kebutuhan korban yang tinggi. P2TP2A DKI Jakarta juga melakukan peningkatan keterampilan di akhir pendampingan dalam usaha memulihkan kondisi psikologis responden dengan cara mempertemukan sesama korban. Bentuknya adalah pelatihan tata boga yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Pelatihan dilakukan di Yayasan Taruna Eka Bakti, dua kali dalam satu tahun dengan intensitas satu minggu setiap kali pelatihan. Faktor-faktor di atas tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan daya pulih responden. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa sebanyak 80 persen responden memiliki daya pulih yang cukup/bagus.

Saran

Beberapa hal yang direkomendasikan dalam penelitian ini:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat baik melalui media maupun sosialisasi tatap muka oleh pemerintah, LSM dan dinas terkait

mengenai ancaman bahaya kekerasan yang dapat terjadi di mana-mana dengan pelaku kekerasan yang sangat memungkinkan adalah orang terdekat kita.

2. Perlu dilakukannya pengenalan kepada masyarakat luas akan keberadaan *crisis center* yang dapat membantu baik secara hukum, fisik, dan psikologis ketika terjadi kekerasan sebagai upaya yang cepat dan tepat dalam menangani sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat.
3. Perlu dilakukannya pemulihan kesehatan jiwa/mental korban tindak kekerasan berupa kegiatan-kegiatan edukasi dan pelatihan dalam bentuk program pemberdayaan sebagai upaya mengurangi dampak psikologis tindak kekerasan dan agar mampu meningkatkan daya pulih serta menjadikan korban tindak kekerasan lebih berdaya.
4. Pemerintah daerah beserta dinas/instansi terkait perlu membangun serta memperluas jaringan (*networking*) dengan LSM, Perguruan Tinggi, tokoh agama sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan penguatan korban tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusni S, Solekhah H (penyunting). 2010. Perempuan ke Gender dalam Pembangunan: Transformasi WID ke GAD. *Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan* (sebuah kajian). Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga. 399 hal
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. [Internet]. [dikutip 01 Oktober 2011]. Dapat diunduh dari: http://www.bps.go.id/booklet/Boklet_Agustus_2010.pdf
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. [Internet]. [dikutip 01 Oktober 2011]. Dapat diunduh dari: http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2011.pdf
- [BPS] Badan Pusat Statistik. [tidak ada tahun]. Human Development Index (HDI) by Province and National 1996-2010. [Internet]. [dikutip 17 Juli 2012]. Dapat diunduh dari: http://dds.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabe=1&daftar=1&id_subyek=26¬ab=2
- Hubeis AVS. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor [ID]: IPB Press. 439 hal
- [Inpres] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. [tidak ada tahun]. [Internet]. [dikutip 09 Maret 2012]. Dapat diunduh dari:
- <http://suyatno.blog.undip.ac.id/files/2010/09/Inpres-No.-9-tahun-2000-tentang-PUG.pdf>
- Kartika T, Solekhah H (penyunting). 2010. *Indikator Kesejahteraan Perempuan*. *Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan* (sebuah kajian). Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga. 399 hal
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Ed 3. Jakarta [ID]: Gramedia Pustaka Utama
- Komnas Perempuan. 2011. *Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan KTP Tahun 2010*. [Internet]. [dikutip 17 Juli 2012]. Dapat diunduh dari: <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2011/06/REVISI-CATAHU-2011-PDF.pdf>
- Poerwandari EK. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. Luhulima AS, editor. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta [ID]: P.T. Alumni
- Saptari R. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta [ID]: Pustaka Utama Grafiti. 505 hal.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed). 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta [ID]: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Sunarto. 2009. *Televisi Kekerasan dan Perempuan*. Bogor [ID]: Grafika Mardi Yuana. 240 hal
- Widanti A. 2005. *Hukum Berkeadilan Gender*. Jakarta [ID]: Penerbit Buku Kompas. 288 hal